BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Pendekatan Pemerintah Melalui Media Website Dalam Mendukung Transparansi Informasi (Studi Kasus pada Laman www.jambikota.go.id), sebagai berikut :

4.1.1 Analisis Pendekatan Pemerintah Kota Jambi dalam Mendukung Transparansi Informasi dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa komponen penting dalam implementasi E-government yang sudah terpenuhi diantaranya :

a. Content Development

Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Situs Badan Pemerintahan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) tahun 2017, setiap situs web badan pemerintahan wajib memiliki delapan jenis konten utama. Website Pemerintah Kota Jambi telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Selain itu, situs ini juga menyediakan fitur komunikasi dua arah melalui layanan aspirasi dan pengaduan, serta dilengkapi dengan tautan yang mengarah ke media sosial resmi pemerintah, seperti Instagram dan YouTube.

b. Competency Building

Diskominfo Kota Jambi sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sistem digital pemerintahan. Setiap bidang didukung oleh tenaga teknis yang ahli di berbagai sektor, seperti

pemrograman, jaringan, dan analisis data. Dengan struktur organisasi yang tersusun secara optimal, implementasi layanan digital dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif.

c. Citizen Interfaces

Bagian ini telah menyediakan Multi Access Channel untuk badan pemerintahan, di mana tautan ke media sosial resmi pemerintah telah dicantumkan di website sebagai sumber informasi tambahan bagi masyarakat. Namun, interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai media sosial resmi masih belum terjalin.

4.1.2 Transparansi Informasi

1. Dalam konteks penerapan transparansi informasi pada website Pemerintah Kota Jambi sudah bisa dikatakan transparan karena tiga aspek penting informasi yang harus dipublikasikan oleh pemerintah sudah bisa terpenuhi, diantaranya :

a. Dokumen-Dokumen Publik

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan delapan jenis informasi yang dapat diakses setiap saat. Website Kota Jambi telah memuat beberapa dokumen publik, seperti APBD dari tahun 2019 hingga 2023, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, serta surat edaran dan keputusan lainnya. Namun, informasi yang disajikan masih terbatas dan belum sepenuhnya lengkap.

b. Aktivitas-Aktivitas Birokrasi

Bagian aktivitas birokrasi telah menyajikan berbagai informasi mengenai kegiatan Pemerintah Kota Jambi, tidak hanya terbatas pada aktivitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berita yang dipublikasikan mencakup berbagai aspek kebijakan pemerintah, mulai dari proses perumusan hingga pencapaian kinerja yang telah diraih.

c. Anggaran

Bagian anggaran telah menyediakan menu yang berisi informasi terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah atau TPAD. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah menampilkan dokumen pengelolaan keuangan daerah di website resminya. Publikasi dokumen ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi serta memperluas akses informasi bagi masyarakat.

2. Derajat Transparansi

Berdasarkan aksesibilitas publik dan akurasi informasi yang tersedia, tingkat transparansi website Pemerintah Kota Jambi saat ini dapat dikategorikan sebagai transparan. Aksesibilitas bagi masyarakat sudah terpenuhi dengan tampilan yang mudah dipahami, sementara informasi yang disajikan cukup lengkap dan akurat.

4.2 SARAN

Berkaitan dengan layanan pada penerapan transparansi di website Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu :

1. Informasi yang disajikan di website perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan akurat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap data yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi sebelum diunggah. Selain itu, dibutuhkan tim khusus yang bertanggung jawab dalam monitoring dan validasi informasi guna memastikan konten selalu selaras dengan perkembangan terbaru. Dengan langkah ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang terpercaya dan up-to-date.
2. Website sebaiknya dilengkapi dengan fitur aksesibilitas yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur tersebut dapat mencakup mode kontras tinggi untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan, fitur teks ke suara agar informasi dapat diakses oleh tunanetra, serta navigasi berbasis keyboard bagi pengguna dengan keterbatasan motorik. Selain itu, setiap gambar yang ditampilkan di website harus memiliki deskripsi alternatif (*alt text*) agar pengguna pembaca layar dapat memahami konten visual dengan lebih baik.
3. Evaluasi website Pemerintah Kota Jambi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah harus mengukur sejauh mana website dimanfaatkan oleh publik dan seberapa baik kontennya dalam memenuhi

kebutuhan informasi. Selain itu, pengembangan fitur dan desain website harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta umpan balik dari masyarakat. Pelatihan bagi pengelola website juga diperlukan agar mereka dapat terus meningkatkan kualitas informasi yang disajikan.